



RENCANA KERJA DISNAKERINTRANS

2022

**DINAS TENAGA KERJA PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2022**

Jalan T. Jogonegoro No. 83, Wonosobo, Phone: (0286) 321338
Email: disnaker.wonosobo@gmail.com

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (RENJA) merupakan Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat Kebijakan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam satu Tahun dan sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah. Disamping itu RENJA berfungsi untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan dan tahun berikutnya.

Rencana Kerja (Renja) sebagai Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat Kebijakan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo.

Namun demikian dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 masih banyak kekurangan, untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat kami harapkan.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini kami ucapkan terimakasih.

Wonosobo, Februari 2022

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar isi	ii
Bab I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Maksud dan Tujuan	5
1.3 Landasan Hukum	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Tahun 2021	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	12
2.3 Isu-isu Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi.....	13
2.4 Hubungan Dengan Dinas/ Instansi Terkait	13
Bab III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	17
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Tahun 2022.....	19
3.3 Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Tahun 2022	19
3.4 Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Tahun 2022.....	22
Bab IV PENUTUP	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) adalah penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renja disusun untuk satu tahun yang memuat evaluasi pelaksanaan pembangunan Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Ketransmigrasian, strategi, program, kegiatan pencapaian Renstra, dan pagu indikatif yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Renstra secara khusus harus dijadikan acuan sepenuhnya untuk penyusunan Rencana Kerja setiap tahun dalam rangka pencapaian visi, misi dan arah pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Wonosobo.

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo secara substantif tidak berdiri sendiri, dokumen ini terkait dengan keberadaan dokumen perencanaan lainnya yang bersifat perencanaan program pembangunan. Oleh karena itu dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi, juga memperhatikan dan mensinergikan dengan RPJM Kementerian Ketenagakerjaan, Perindustrian, dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI, RPJM Provinsi Jawa Tengah, Renstra Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah, Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan Ketenagakerjaan dan Perindustrian.

Hubungan antara antara Renja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo tahun 2022 dengan dokumen perencanaan lainnya dapat digambarkan secara ringkas sebagai berikut:



Gambar 1.1 Keterkaitan Renja dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 ini disusun dengan maksud digunakan sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan Program Kegiatan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Tahun 2023 yang telah mengakomodir usulan hasil Musrenbang dan Pokok-pokok Pikiran DPRD di Kabupaten Wonosobo.

1.2.2 Tujuan

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 ini disusun dengan tujuan untuk memastikan arah dan acuan pembangunan yang ingin dicapai Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi dalam kurun waktu satu tahun sekaligus indicator pencapaian yang harus dipenuhi yang telah ditetapkan dalam Renstra dan RPJMD Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi.

1.3 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian;
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10)
12. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo;

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 disusun dengan Sistematika sebagai berikut:

- Bab 1. Pendahuluan, mencakup Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.
- Bab 2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Tahun 2022, mencakup Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Tahun lalu dan Capaian Renja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi, Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
- Bab 3. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, meliputi Telaah terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi serta Program dan Kegiatan.
- Bab 4. Penutup

Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja 2022 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Landasan Hukum
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 2.3. Isu-isu Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 2.4. Hubungan dengan Dinas/ Instansi Terkait

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022
- 3.3. Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022
- 3.4. Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

BAB VI PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Tahun 2021

Guna mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2021, Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo diberikan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.579.812.850 dan terealisasi sejumlah Rp. 8.635.307.778 atau senilai 90,14%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I
REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN PADA TAHUN 2021

No	Urusan/Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja	9.150.056.650	8.504.487.840	92,94
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	3.021.728.000	2.695.688.994	89,21
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	2.781.728.000	2.462.302.694	88,52
	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	240.000.000	233.386.300	97,24
	Pengelolaan Informasi Tenaga Kerja	100.000.000	99.893.552	99,89
	Job Fair/Bursa Kerja	100.000.000	99.893.552	99,89
	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0,00
	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	-	-	0,00
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000	149.250.000	99,50
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000	149.250.000	99,50
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	596.325.000	590.525.853	99,03
	Pemeliharaan Mebel	3.000.000	2.815.000	93,83
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000	14.970.000	99,80
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	430.120.000	427.738.000	99,45

		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000	21.980.091	87,92
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	123.205.000	123.022.762	99,85
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.682.700	39.606.000	71,13
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.682.700	39.606.000	71,13
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	172.780.000	169.490.880	98,10
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.500.000	3.470.000	63,09
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.500.000	12.496.760	99,97
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.650.000	13.637.000	99,90
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.380.000	23.368.000	99,95
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	117.750.000	116.519.120	98,95
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100.000.000	97.986.100	97,99
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	100.000.000	97.986.100	97,99
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.618.892.820	4.384.796.165	94,93
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.618.892.820	4.384.796.165	94,93
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	334.648.130	277.250.296	82,85
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	106.000.000	73.391.264	69,24
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	226.923.130	202.139.032	89,08
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.725.000	1.720.000	99,71
		Urusan Pilihan Perindustrian	429.756.200	130.819.938	30,44
		Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	139.290.000	125.639.938	90,20
		Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	139.290.000	125.639.938	90,20
		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUK) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	290.466.200	5.180.000	1,78

		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Inform	198.066.800	-	0,00
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	92.399.400	5.180.000	5,61
		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	0,00
		Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	-	-	0,00
		Urusan Pilihan Transmigrasi	-	-	0,00
		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	-	-	0,00
		Penguatan SDM dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	-	-	0,00

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi

a. Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketenagakerjaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan, maka penyusunan capaian kinerja urusan Ketenagakerjaan harus memperhatikan target SPM yang sudah ditetapkan. Target Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan batas waktu pencapaian sampai dengan tahun 2016. Lima pelayanan dasar Bidang Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Pelatihan Kerja, indikator SPM: besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi, target tahun 2018 adalah 53%; besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat, target tahun 2018 adalah 71%.
2. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja, indikator SPM: besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan, target tahun 2018 adalah mencapai 49,24%.
3. Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, indikator SPM adalah besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB), target sampai tahun 2018 adalah 100%
4. Pelayanan Kepesertaan Jamsostek, indikator SPM: besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek, target tahun 2018 adalah mencapai 50%.

Perlu disampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor : PER.15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan, dirubah dengan Permenakertrans Nomor 2 tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tentang Ketenagakerjaan

b. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Wajib Ketenagakerjaan dan Urusan Pilihan Ketransmigrasian

Permendagri Nomor 73 Tahun 2010 tentang Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan Ketenagakerjaan dan Urusan Ketransmigrasian ditetapkan 3 (tiga), yaitu:

Urusan Ketenagakerjaan:

1. Pelayanan kepesertaan Jaminan sosial bagi pekerja/ buruh, capaian kinerja 72,37% dengan rumusan perbandingan Jumlah pekerja / buruh peserta program jamsostek aktif dengan Jumlah pekerja / buruh dikali 100%.
2. Pencari Kerja Yang Ditempatkan, capaian kinerja sebesar 63,78% dengan rumusan jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan dengan jumlah Pencari Kerja yang mendaftar dikali 100%.

Urusan Ketransmigrasian: Transmigrasi Swakarsa capaian kinerja 0% dengan rumusan jumlah Transmigran Swakarsa dibanding dengan jumlah Transmigran dikali 100.

1.2 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

a. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi

Permasalahan yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi dalam upaya pengembangan pelayanan Ketenagakerjaan, Perindustrian, dan Transmigrasi, yang didasarkan pada fungsi bidang pelayanan dijelaskan sebagai berikut :

1. Permasalahan terkait urusan ketenagakerjaan
 - a. Angka pengangguran masih cukup tinggi dengan perkembangan lapangan pekerjaan yang terbatas;
 - b. Informasi peluang kerja dan mekanisme penempatan tenaga kerja belum sepenuhnya dipahami masyarakat;
 - c. Masih rendahnya kualitas angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja masih didominasi oleh lulusan SD kebawah sebesar 278.098 orang atau 65,50% di tahun 2018;
 - d. Identifikasi Kebutuhan pelatihan belum dapat dilakukan dengan baik;
 - e. Masih lemahnya kelembagaan hubungan industrial;
 - f. Pembinaan dan Sosialisasi Kebijakan Ketenagakerjaan masih kurang;
 - g. Pembinaan dan sosialisasi dari mediator hubungan Industrial untuk program jamsostek Tenaga Kerja Luar Hubungan kerja masih kurang;
 - h. Belum tersedianya data mengenai produktivitas usaha marginal dan kondisi pasar kerja yang valid.
2. Permasalahan terkait urusan perindustrian
 - a. Hambatan peningkatan efisiensi produksi,
 - b. Pengusaha Industri Kecil Menengah lebih memprioritaskan pada aspek produksi, sedangkan aspek pemasaran, keuangan, dan aspek manajemen masih sangat kurang.
 - c. Industri Kecil Menengah masih lemah dalam inovasi desain produk.
 - d. Kemitraan usaha dan jaringan pemasaran masih terbatas.
 - e. Belum optimalnya pengembangan industri sesuai dengan tata ruang wilayah yang berwawasan lingkungan dalam meningkatkan investasi industri
 - f. Terbatasnya dukungan infrastruktur pendukung sarana prasarana teknis dan kondisi mesin yang sudah tua
 - g. Daya saing masih rendah, pengetahuan dan keterampilan pelaku industri masih terbatas.

3. Permasalahan terkait urusan transmigrasi

Jumlah animo transmigrasi tidak sebanding dengan target/ kuota yang diberikan dari Pusat (Kemenakertrans RI). Tingkat penempatan transmigrasi masih sangat rendah, diantaranya karena keterbatasan lokasi transmigrasi dan kuota transmigrasi ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Rendahnya kualitas calon transmigran dan kurangnya penguasaan informasi terhadap calon lokasi transmigrasi.

b. Isu Strategis

Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan pekuang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik dari isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa depan. Isu strategis dalam Rencana Strategis Tahun 2017-2021 disusun berdasarkan beberapa sumber, **pertama** berdasarkan pada permasalahan dan isu strategis Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, **kedua** berdasarkan analisis terhadap situasi dan kondisi urusan ketenagakerjaan, perindustrian dan ketransmigrasian di Kabupaten Wonosobo, **ketiga** bersumber dari permasalahan dan isu dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wonosobo (RPJPD) dan RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 - 2021, dan **keempat** didasarkan pada analisis capaian kinerja pelaksanaan urusan ketenagakerjaan, perindustrian dan ketransmigrasian, sehingga dapat diidentifikasi berbagai permasalahan umum yang dapat diangkat menjadi agenda atau prioritas pembangunan tahun 2017 – 2021.

Penentuan isu strategis didahului dengan *review* terhadap kebijakan pembangunan nasional dan agenda pembangunan regional, dan daerah yang relevan dalam memberi arah pembangunan ketenagakerjaan, perindustrian, dan ketransmigrasian di Kabupaten Wonosobo. Hasil *review* akan melengkapi draft isu strategis Urusan Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Ketransmigrasian.

Berdasarkan hasil analisis terhadap hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi isu - isu strategis urusan ketenagakerjaan, perindustrian dan ketransmigrasian Kabupaten Wonosobo, sebagai berikut:

1. Terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia, tidak sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja;
2. Rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja;

3. Kualitas pelayanan penempatan tenaga kerja yang belum sepenuhnya berorientasi pada kepuasan pelanggan;
4. Tata kelola pelatihan ketrampilan bagi tenaga kerja yang masih memerlukan perbaikan;
5. Rendahnya perlindungan dan kesejahteraan pekerja;
6. Lemahnya kemampuan IKM dalam aspek pemasaran, keuangan, dan manajemen;
7. Pelaku IKM masih lemah dalam menjaga kualitas produk, inovasi dan pengembangan desain kemasan dan produk;
8. Lemahnya jaringan kemitraan dengan industri besar dan perbankan;
9. Daya saing masih rendah, pengetahuan dan keterampilan pelaku industri masih terbatas; dan
10. Terbatasnya alokasi penempatan transmigrasi tidak sebanding dengan animo masyarakat.

1.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo tahun 2019 disusun telah berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Sehingga tidak ada perubahan dalam Program-Kegiatan maupun besaran anggaran. Urusan wajib Ketenagakerjaan terdiri dari empat program dan 26 kegiatan, Urusan Pilihan Ketransmigrasian terdiri dari satu program dan satu kegiatan. Urusan pilihan Perindustrian terdiri dari tiga program dan dua puluh kegiatan, serta didukung dengan dua program pendukung untuk kelancaran pelayanan administrasi perkantoran.

1.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program kegiatan masyarakat melalui musrenbang mulai dari musrenbang tingkat Kecamatan untuk tahun 2019 yang sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo telah diakomodir dalam program kegiatan dalam Renja Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo Tahun 2018.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Renstra. Rencana Strategi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi secara substantif tidak berdiri sendiri, dokumen ini terkait dengan keberadaan dokumen perencanaan lainnya yang bersifat perencanaan program pembangunan (a-spatial). Oleh karena itu dalam penyusunannya memperhatikan dan mensinergikan dengan: **pertama** berdasarkan pada rencana strategis Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, **kedua** Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2005 - 2025, **ketiga** Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 - 2021, **keempat** Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 - 2021.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Tahun 2022

Rumusan Visi Misi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo berlandaskan pada RPJPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2005 - 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2010, telah mengamanatkan Visi Daerah, yaitu "**Mewujudkan Wonosobo Yang Berdaya Saing, Maju dan Sejahtera**", selanjutnya dijabarkan kembali sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2016, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2020-2024, yaitu: "**TERWUJUDNYA WONOSOBO BERSATU UNTUK MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA**".

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, maka seluruh program, kegiatan dan pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo tidak lain diarahkan pada upaya memberi kontribusi pada pencapaian visi tersebut. Kontribusi pembangunan ketenagakerjaan, perindustrian dan transmigrasi di Kabupaten Wonosobo, setidaknya diharapkan memberi kontribusi pada upaya pencapaian misi **ketiga dan keempat**. Misi ketiga yaitu meningkatkan kemandirian daerah yang bertujuan meningkatkan produktivitas, kemampuan pengelolaan sumberdaya yang optimal dengan tetap memperhatikan lingkungan dan membangun budaya berdaya, dengan sasaran yang hendak dicapai berupa meningkatnya produksi dan produktivitas daerah dengan tetap menjaga kualitas lingkungan.

Sedangkan misi ke-4 adalah meningkatkan pelayanan dasar dan sarana prasarana

publik untuk kesejahteraan yang merata yang bertujuan mewujudkan pertumbuhan yang berkeadilan dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Guna mendukung pencapaian visi misi RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2020-2024, maka ditetapkan misi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas tata kelola organisasi
2. Meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan kualitas penempatan tenaga kerja
3. Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
4. Meningkatkan hubungan industrial yang harmonis serta kesejahteraan pekerja
5. Meningkatkan daya saing industri yang produktif, inovatif, dan ramah lingkungan
6. Meningkatkan kualitas pelayanan penempatan transmigrasi

Sebagai penjabaran untuk mewujudkan visi pembangunan daerah Kabupaten Wonosobo melalui Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan tujuan dan sasaran pada urusan tenaga kerja, perindustrian dan transmigrasi, yang akan dicapai sebagai bentuk perwujudan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan dan sasaran pada hakikatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Wonosobo. Tujuan dan sasaran pada masing-masing misi diuraikan sebagai berikut:

1. Misi 1 : Meningkatkan kualitas tata kelola organisasi

Tujuan : Mewujudkan kualitas kinerja yang efektif, efisien dan profesional dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)

Sasaran : Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif, transparan dan akuntabel
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance*

2. Misi 2 : Meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan kualitas penempatan tenaga kerja

Tujuan : Mengembangkan lapangan kerja dan kesempatan kerja

Sasaran : Meningkatnya kualitas penempatan tenaga kerja

Meningkatnya kesempatan kerja terutama bagi kelompok rentan

3. Misi 3 : Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

Tujuan : Meningkatkan kompetensi, produktivitas dan daya saing tenaga kerja

Sasaran :

Meningkatkan kualitas dan daya saing angkatan kerja melalui pelatihan yang berkualitas dan berstandar nasional

4. Misi 4 : Meningkatkan hubungan industrial yang harmonis serta kesejahteraan pekerja
Tujuan : Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan guna meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja
Sasaran : Meningkatkan jaminan sosial tenaga kerja
5. Misi 5 : Meningkatkan daya saing industri yang produktif, inovatif, dan ramah lingkungan
Tujuan : Meningkatkan kontribusi sektor industri bagi pertumbuhan ekonomi daerah
Sasaran : Meningkatkan produktivitas sektor industri
Meningkatkan pertumbuhan industri
6. Misi 6 : Meningkatkan kualitas penempatan transmigrasi
Tujuan : Meningkatkan kualitas layanan penempatan transmigrasi
Sasaran : Meningkatkan kerjasama penempatan transmigrasi

3.3 Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Tahun 2022

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang bertugas untuk membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja, bidang perindustrian dan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepala daerah..

Sesuai dengan visi Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 yaitu “Mewujudkan Wonosobo yang Berdaya Saing, Maju dan Sejahtera”, maka uraian program beserta kegiatan yang dirancang Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 dapat di lihat pada tabel berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
 - a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan:
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor,
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor,
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan,
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan,
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 - c. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat,
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik,
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
 - d. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan,
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya,
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya,
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
2. Program Perencanaan Tenaga Kerja
 - Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja
 - Sub Kegiatan: Penyusunan Rencana Kerja Mikro.
3. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - Kegiatan pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi, pembinaan LPKS

4. Program Penempatan Tenaga Kerja
Kegiatan Pelayanan antar kerja di Daerah Kabupaten/kota
Sub Kegiatan: pelayanan antar kerja
5. Program Hubungan Industrial
Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja Dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
6. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

Sub kegiatan : koordinasi sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri
7. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota

Kegiatan : penerbitan izin usaha industri (IUI), izin perluasan usaha industri (IPUI), izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) kewenangan kabupaten/kota

3.2 RENCANA KERJA (RENJA) DINAS TENAGA KERJA PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA															
2	07	01	OGRA	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
2	07	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4,631,942,451					5,009,552,433		
2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase aset perangkat daerah dalam kondisi baik	Gaji dan tunjangan ASN, tunjangan tambahan penghasilan ASN, belanja insentif bagi ASN atas pungutan pajak daerah	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN		100 %	14 bulan	14 bulan	4,631,942,451	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase aset perangkat daerah dalam kondisi baik	100 %	5,009,552,433
2	07	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						148,560,300				221,219,000			
2	07	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase aset perangkat daerah dalam kondisi baik	Penyediaan komponen instalasi listrik	Terlaksananya penyediaan administrasi umum		100 %	12 bulan	12 bulan	13,650,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase aset perangkat daerah dalam kondisi baik	100 %	15,249,000
2	07	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase aset perangkat daerah dalam kondisi baik	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya penyediaan administrasi umum		100 %	12 bulan	12 bulan	23,380,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase aset perangkat daerah dalam kondisi baik	100 %	26,480,000
2	07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase aset perangkat daerah dalam kondisi baik	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya penyediaan administrasi umum		100 %	12 bulan	12 bulan	12,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase aset perangkat daerah dalam kondisi baik	100 %	28,740,000
2	07	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase aset perangkat daerah dalam kondisi baik	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya penyediaan administrasi umum		100 %	12 bulan	12 bulan	3,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase aset perangkat daerah dalam kondisi baik	100 %	3,000,000
2	07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase aset perangkat daerah dalam kondisi baik	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya penyediaan administrasi umum		100 %	12 bulan	12 bulan	96,030,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase aset perangkat daerah dalam kondisi baik	100 %	147,750,000
2	07	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						332,386,700				381,600,300			
2	07	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase aset perangkat daerah dalam kondisi baik	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang		100 %	12 bulan	12 bulan	1,725,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase aset perangkat daerah dalam kondisi baik	100 %	1,725,000
2	07	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase aset perangkat daerah dalam kondisi baik	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang		100 %	12 bulan	12 bulan	106,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase aset perangkat daerah dalam kondisi baik	100 %	116,000,000
2	07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase aset perangkat daerah dalam kondisi baik	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang		100 %	12 bulan	12 bulan	224,661,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase aset perangkat daerah dalam kondisi baik	100 %	263,875,300
2	07	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						114,325,000				1,281,575,500			
2	07	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase aset perangkat daerah dalam kondisi baik	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor		100 %	12 bulan	12 bulan	73,205,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase aset perangkat daerah dalam kondisi baik	100 %	84,639,250
2	07	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Persentase aset perangkat daerah dalam kondisi baik	Pemeliharaan mebel	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor		100 %	12 bulan	12 bulan	6,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase aset perangkat daerah dalam kondisi baik	100 %	9,640,000
2	07	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase aset perangkat daerah dalam kondisi baik	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor		100 %	12 bulan	12 bulan	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase aset perangkat daerah dalam kondisi baik	100 %	20,200,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 07 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase aset perangkat daerah dalam kondisi baik	Rehabilitasi gedung pelatihan dan lingkungan BLK Rehabilitasi/ Pemeliharaan gedung kantor dan lingkungan kantor	Terpeliharanya sarana dan prasarana kantor		100 %	0 paket 1 paket	12 bulan	20,120,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase aset perangkat daerah dalam kondisi baik	100 %	1,142,096,250
2 07 02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA								30,000,000					100,000,000
2 07 02 2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)								30,000,000					100,000,000
2 07 02 2.01 02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Persentase tenaga kerja yang mengikuti pelatihan dan mendapat sertifikat kompetensi	Penyempurnaan Raperda pelatihan	Penyempurnaan Raperda Pelatihan		22,31 %	1 dokumen	1 dokumen	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tenaga kerja yang mengikuti pelatihan dan mendapat sertifikat kompetensi	22,31 %	100,000,000
2 07 03 PROGRAM	PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA								1,179,000,000					2,371,000,000
2 07 03 2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi								1,154,000,000					2,046,000,000
2 07 03 2.01 01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase tenaga kerja yang mengikuti pelatihan dan mendapat sertifikat kompetensi	Pelatihan berbasis kompetensi di BLK Pelatihan berbasis kompetensi di masyarakat Pelatihan Keterampilan Las bagi Desa Pacarmulyo Kecamatan Leksono, Pelatihan Keterampilan Las bagi Karangtaruna Desa Sigedang Pelatihan Keterampilan Las bagi Warga Desa Pulosaren Kepil Pelatihan Keterampilan Las bagi Warga Ds. Wonolinggo, Jonggolsari Leksono Pelatihan keterampilan Las bagi warga Kecamatan Kalikajar Pelatihan Keterampilan Las bagi warga Kecamatan Kertek Pelatihan keterampilan tata boga dan tata rias bagi warga Kelurahan Wringinanom Pelatihan Keterampilan Tata Rias Kecamatan Watumalang Penyusunan analisis kebutuhan pelatihan, pengembangan dan sinkronisasi kebutuhan pelatihan dengan dunia industri, kerjasama	Jumlah paket pelatihan yang dilaksanakan sesuai dengan regulasi penyelenggaraan PBK		22,31 %	48 orang 64 orang 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 0 dokumen	18 paket pelatihan	1,100,000,000			Persentase tenaga kerja yang mengikuti pelatihan dan mendapat sertifikat kompetensi	22,31 %	1,346,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
			kemitraan dengan dunia industri											
2 07 03 2.01 02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Persentase tenaga kerja yang mengikuti pelatihan dan mendapat sertifikat kompetensi	Peningkatan kapasitas instruktur dan tenaga kepelatihan BLK	Jumlah paket pelatihan yang dilaksanakan sesuai dengan regulasi penyelenggaraan PBK		22,31 %	25 orang	18 paket pelatihan	54.000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tenaga kerja yang mengikuti pelatihan dan mendapat sertifikat kompetensi	22,31 %	100.000,000
2 07 03 2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta							25.000,000						75.000,000
2 07 03 2.02 01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase LPK bersertifikat nasional	Akreditasi LPKS Peningkatan kapasitas LPKS	Peningkatan kapasitas LPKS		28,77 %	1 LPKS 50 orang	50 Instruktur LPKS	25.000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase LPK bersertifikat nasional	28,77 %	75.000,000
2 07 04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA							611.718,600						9.300.000,000
2 07 04 2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota							440.000,000						1.400.000,000
2 07 04 2.01 02	Pelayanan antar Kerja	Pertumbuhan jumlah kerjasama penempatan tenaga kerja dengan perusahaan	Job Canvassing Pelayanan antar kerja	Penempatan tenaga kerja		33,2 %	5 Perusahaan 1200 orang	1200 orang	30.000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pertumbuhan jumlah kerjasama penempatan tenaga kerja dengan perusahaan	33,2 %	150.000,000
2 07 04 2.01 05	Perluasan Kesempatan Kerja	Pertumbuhan jumlah kerjasama penempatan tenaga kerja dengan perusahaan	Klinik wirausaha (Layanan konsultasi dan pengembangan wirausaha baru/ start up) Pelatihan keterampilan bagi warga miskin Pelatihan keterampilan dan kewirausahaan bagi buruh tani tembakau Pelatihan keterampilan dan kewirausahaan melalui pemberdayaan TKM Pelatihan keterampilan dan kewirausahaan prosesi hasil pertanian bagi warga Dusun Gedangsari Wonokampir Watumalang Penciptaan wirausaha baru melalui inkubasi bisnis	Penempatan tenaga kerja		33,2 %	0 orang 0 orang 0 orang 32 orang 1 paket 10 orang	1200 orang	410.000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Insentif Daerah		Pertumbuhan jumlah kerjasama penempatan tenaga kerja dengan perusahaan	33,2 %	1.050.000,000
2 07 04 2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota							171.718,600						7.900.000,000
2 07 04 2.04 01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Persentase kenaikan wirausaha baru	Pelatihan keterampilan bagi calon pekerja migran Sosialisasi penempatan tenaga kerja Sosialisasi penempatan tenaga kerja	Pelatihan kewirausahaan bagi PMI purna penempatan		19,1 %	20 CPMI 0 P3MI 50 orang	120 orang	171.718,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kenaikan wirausaha baru	19,1 %	7.600.000,000
2 07 05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL							100.000,000						335.000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 07 05 2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota								100,000,000					235,000,000
2 07 05 2.02 01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perselisihan kerja yang terselesaikan	Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Menurunnya jumlah perselisihan kerja		100 %	60 perusahaan	100 %	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase perselisihan kerja yang terselesaikan	100 %	35,000,000
2 07 05 2.02 04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perselisihan kerja yang terselesaikan	Jumlah perusahaan yang melaksanakan struktur skala upah Penyusunan rekomendasi UMK Penyusunan rencana kerja BP LKS Tripartit Tingkat kepatuhan perusahaan dalam pelaksanaan pemberian THR Tingkat kepatuhan perusahaan dalam pelaksanaan UMK	Menurunnya jumlah perselisihan kerja		100 %	20 perusahaan 1 dokumen 1 dokumen 85 % 20 %	100 %	75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase perselisihan kerja yang terselesaikan	100 %	200,000,000
3	URUSAN PERINDUSTRIAN	ERINTAHAN PILIHAN												
3 31	URUSAN PERINDUSTRIAN	MERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								534,281,400				1,350,000,000
3 31 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI									509,281,400				1,000,000,000
3 31 02 2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota								509,281,400					1,000,000,000
3 31 02 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Pertumbuhan industri kecil	Penyusunan Naskah Akademik KIHT	Sertifikasi produk IKM		2 %	1 dokumen	78 IKM	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pertumbuhan industri kecil	2 %	0
3 31 02 2.01 04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Pertumbuhan industri kecil	Bimbingan teknis ISO dan SNI bagi IKM Fasilitasi sertifikasi bagi IKM	Sertifikasi produk IKM		2 %	0 IKM 50 IKM	78 IKM	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok		Pertumbuhan industri kecil	2 %	425,000,000
3 31 02 2.01 05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Pertumbuhan industri kecil	Bimbingan teknis e-commerce dan multimedia bagi IKM Pelatihan pengembangan usaha industri pembuatan tungku bara Pelatihan pengolahan dan pengembangan produk IKM bagi buruh tani tembakau Pelatihan/ pengolahan home industry Atsiri Penguatan kelembagaan sentra IKM	Sertifikasi produk IKM		2 %	15 IKM 1 paket 0 orang 1 paket 0 sentra IKM	78 IKM	209,281,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pertumbuhan industri kecil	2 %	375,000,000
3 31 03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA									25,000,000				100,000,000
3 31 03 2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota								25,000,000					100,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3 31 03 2.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase industri yang mempunyai izin usaha	Fasilitasi IUI bagi IKM	IKM yang mendapatkan fasilitasi izin usaha		95 %	110 IKM	495 IKM	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase industri yang mempunyai izin usaha	95 %	100,000,000
3 32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI								45,000,000					100,000,000
3 32 04 PROGRAM	PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI								45,000,000					100,000,000
3 32 04 2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian								45,000,000					100,000,000
3 32 04 2.01 02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Persentase kenaikan wirausaha baru	Monev dan fasilitasi penguatan infrastruktur sosial ekonomi transmigran	Terlaksananya monev transmigran		19,1 %	5 KK	10 KK	45,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kenaikan wirausaha baru	19,1 %	100,000,000
TOTAL									7,727,214,451					21,949,947,233

BAB IV

PENUTUP

Dalam pelaksanaan kebijaksanaan, program dan kegiatan yang diarahkan pada sasaran dan tujuan dengan mengacu pada visi dan misi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo. Rencana Kerja tahun 2022 harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, baik untuk kegiatan administrasi umum yang bersifat rutin maupun kegiatan pembangunan.

Upaya Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo pada tahun 2022 ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dengan berbagai hambatan dan kendala, harus mampu meningkatkan capaian kinerja secara keseluruhan lebih optimal, maka Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo tahun 2022 menetapkan indicator capaian kinerja adalah "Persentase peserta pelatihan kerja yang mendapatkan sertifikat kompetensi berstandar nasional 12%; Persentase pertumbuhan industri kecil menengah 3.8%; Pertumbuhan produktivitas sektor industri 5.9%; Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) 94.59%, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 75.64%, Angka sengketa pengusaha-pekerja 1%, Persentase Tenaga Kerja yang menjadi peserta Program Perlindungan Tenaga Kerja (jamsostek dll) 70%, Indeks Kepuasan Masyarakat 87.6%, dan Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi 89%.

Demikian Rencana Kerja Tahun 2022 disusun, semoga dapat dijadikan acuan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten Wonosobo di bidang ketenagakerjaan, perindustrian dan ketransmigrasian serta mampu menyajikan kinerja yang lebih optimal.

Wonosobo, Januari 2022

Kepala Dinas
Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi,


Dr. BRAYITNO, S.Sos, M.Si
NIP. 197106231993031006